



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SULIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 238618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **290.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/72 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/70 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **144.000.000**

1. MOTOR, VARIO NC12AF2CBI Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA X1N02O44L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **12.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **202.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **446.202.000**

III. HUTANG **Rp.** **17.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **429.202.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.